



KR-Judiman

Pergelaran Bantul Inclusive Carnival 2023 disambut antusias masyarakat.

BMKG KELUARKAN PERINGATAN

Waspada Banjir Rob di Jateng-DIY

JAKARTA (KR) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta warga waspada potensi banjir pesisir atau banjir rob di beberapa bagian wilayah Jawa Tengah (Jateng) menyusul banjir rob yang terjadi di daerah Sayung, Demak, Rabu (10/5).

Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo di Jakarta, Rabu, BMKG sudah memperkirakan potensi banjir pesisir di beberapa bagian wilayah Jawa Tengah, termasuk Demak, dari 9 sampai 16 Mei 2023.

Selama periode itu, menurut Eko, wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah seperti Kota Semarang,

Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, pesisir Rembang, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes menghadapi potensi banjir rob akibat pasang air laut.

Dikatakan, banjir di daerah pesisir dapat mengganggu kegiatan transportasi di area sekitar pelabuhan, pertanian ga-

ram, budidaya perikanan darat, serta bongkar muat barang di pelabuhan. "Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir rob," katanya.

BMKG telah mengimbau masyarakat untuk waspada potensi banjir pesisir semasa bulan purnama pada 5 Mei 2023. "Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut," kata Eko.

Ia mengemukakan, banjir rob berpeluang terjadi di beberapa daerah

pesisir di Indonesia, termasuk pesisir Aceh, pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Lampung, pesisir Banten, dan pesisir Utara DKI Jakarta.

Daerah pesisir Jawa Barat, pesisir Jawa Tengah, pesisir Jawa Timur, pesisir Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, pesisir Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, pesisir Kalimantan Barat, pesisir Kalimantan Tengah, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Maluku, dan pesisir Maluku Utara juga berpeluang menghadapi banjir rob. **(Ant/San)-f**

BANTUL INCLUSIVE CARNIVAL 2023

Menuju Kota Kreatif Dunia

BANTUL (KR) - Ribuan warga Bantul, Rabu (10/5) siang memadati Jalan Yogya-Parangtritis untuk menyaksikan gelaran Bantul Inclusive Carnival (BIC) 2023. Mulai pukul 13.00 Jalan Yogya-Parangtritis dari Kampus ISI Yogyakarta hingga Pasar Seni Gabusan ditutup bagi pengguna semua jenis kendaraan.

Arak-arakan panjang peserta BIC dilapas Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dari pintu gerbang Kampus ISI Yogyakarta menuju Pasar Seni Gabusan (PSG). Barisan paling depan dimeriahkan Drum-band STTKD Yogyakarta.

Bupati Bantul beserta istri, Kapolres Bantul, Sekda dan jajaran Forkompinkab Bantul usai melepas BIC langsung ikut bergabung di barisan depan mengikuti BIC berjalan kaki sekitar 2 km dari ISI ke PSG. Bupati Bantul mengemukakan, Bantul Inclusive Carnival 2023 merupakan penanda kesiapan masyarakat Bantul untuk menuju Bantul sebagai kota kreatif dunia, yang telah dinyatakan sebagai salah satu nominator mewakili Indonesia ke UNESCO PBB. "Bantul ingin mempertunjukkan pesan kepada dunia, Bantul ingin menyampaikan pesan kepada dunia, bahwa Kabupaten Bantul adalah kota kreatif

yang kuat di Indonesia. Yang kuat dan pantas masuk menjadi anggota UCCN, jejaring kota-kota kreatif dunia," katanya.

Karena itu, lanjut Bupati Bantul, saat ini telah berkumpul para pelaku ekonomi kreatif dari berbagai jenis dan ragamnya. Ini menunjukkan solidaritas pelaku ekonomi kreatif di Bantul yang bisa diandalkan, sehingga masyarakat Bantul bisa bersama-sama, bersatu padu untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, yang akan menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat Bantul.

Bantul Inclusive Carnival 2023 yang di-berangkatkan dari Kampus ISI menyimbolkan dapurnya perencanaan dan perancangan ekonomi kreatif dan menuju ke Pasar Seni Gabusan (PSG) sebagai simbol hilirnya ekonomi kreatif, etalase hasil industri kreatif. "Masyarakat Bantul harus bangga karena Bantul menjadi salah satu nominator kota kreatif di dunia mewakili Indonesia dan mudah-mudahan ini akan berhasil dan Bantul akan semakin dikenal, terutama karena mempunyai seni rakyat dan industri kreatif sehingga makin dikenal dunia dan akan melancarkan pemasaran produk-produk hasil karya tangan-tangan kreatif masyarakat Bantul," ujarnya. **(Jdm)-f**

SEMBUNYIKAN ASET HASIL KORUPSI

Rafael Alun Tersangka Dugaan TPPU

JAKARTA (KR) - Penetapan sebagai tersangka kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penetapan status tersangka terhadap RAT setelah tim penyidik memeriksa sejumlah bukti terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan perpajakan yang dilakukan RAT.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, membenarkan atas penetapan tersangka tersebut. "Iya benar, KPK saat ini telah menetapkan kembali RAT sebagai tersangka dugaan TPPU," jelasnya di Jakarta, Rabu (10/5).

Terhadap hal itu penyidikan menemukan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Jadi, diduga kuat ada kepemilikan aset-aset tersangka RAT yang ada tautan dengan dugaan TPPU. "Dalam hal ini di antaranya dengan menempatkan, meng-

alihkan, membelanjakan sekaligus menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta miliknya yang diduga bersumber dari korupsi," kata Ali.

Terkait pengumpulan alat bukti saat ini, menurutnya, telah dilakukan. Hal ini antara lain dengan melakukan penelusuran berbagai aset yang melibatkan unit Aset Tracing Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK.

Ali menegaskan, penerapan TPPU sejalan dengan komitmen KPK untuk memaksimalkan penyitaan dan perampasan sebagai aset recovery hasil korupsi. Selain itu, KPK telah secara resmi menahkan dan menetapkan RAT sebagai tersangka pada tanggal 3 April 2023.

Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak. Tersangka juga diduga memiliki beberapa perusahaan, salah satunya ialah PT Artha Mega Ekadhana (AME). **(Ful)-d**

KPK TETAPKAN TERSANGKA BARU KASUS SUAP MA

Sudrajad Dimyati Dituntut 13 Tahun Penjara

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Meski demikian, KPK belum bersedia membeberkan identitas kedua tersangka tersebut maupun peran, konstruksi perkara, dan pasal yang disangkakan.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan tentang penetapan tersangka baru. "Benar, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu pejabat di MA dan seorang swasta," ungkapnya di Jakarta, Rabu (10/5).

Mengenai dua tersangka baru ini, Ali belum bersedia membeberkan identitas kedua tersangka tersebut maupun peran, konstruksi perkara, dan pasal yang disangkakan. Pasalnya, hal itu akan diumumkan setelah alat bukti dinyatakan lengkap dan

penyidikan telah rampung.

Kelengkapan alat bukti ini, menurut Ali, menjadi prioritas yang terus dikumpulkan. "Ini untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki," jelasnya.

Seperti diberitakan, sebelumnya KPK telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kini, dengan penetapan dua tersangka baru, total ada 17 tersangka dalam kasus tersebut.

Para tersangka yang telah diumumkan adalah Hakim Yustisial nonaktif Edy Wibowo (EW), Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS), Hakim Yustisial nonaktif Prasetyo Nugroho (PN), dan Redhy Novarisza (RN) selaku staf Gazalba Saleh. Tersangka lainnya, Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD), Hakim Yudisial nonaktif atau Panitera Pengganti Elly Tri Pangestu (ETP),

dua aparat sipil negara (ASN) Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua ASN di MA Nuranto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Selain itu, pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) serta debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT), debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS), dan tersangka terbaru adalah Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar Wahyudi Hardi (WH).

Terkait perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menuntut Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dengan hukuman selama 13 tahun penjara. JPU Wawan Yunarwanto, mengatakan, tuntutan itu disampaikan karena terdakwa Sudrajad terbukti bersalah menerima suap 80 ribu dolar Singapura. **(Ful)-d**

ANTISIPASI MUSIM KEMARAU

DIY Siapkan Dropping Air Bersih

YOGYA (KR) - Wilayah DIY diprediksi segera memasuki musim kemarau. Kondisi itu mendapatkan perhatian dari sejumlah stakeholders terkait. Guna mengantisipasi terjadinya kekurangan air saat musim kemarau, sejumlah antisipasi mulai dilakukan. Di antaranya dengan melakukan koordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY dengan BPBD di lima kabupaten kota sampai persiapan untuk dropping air.

"Guna menghadapi musim kemarau kami telah melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan sejumlah stakeholder. Mulai dari BPBD DIY maupun BPBD di lima kabupaten/kota, Dinas PUP ESDM DIY, dan Dinas Sosial DIY. Di antaranya dengan menyiapkan dropping air bersih yang akan didistribusikan ke wilayah rawan kekurangan. BPBD Kabupaten Gunungkidul menyiapkan 1.000 tangki dan Dinas Sosial menyiapkan 280 tangki air," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY Lilik Andi Aryanto di Yogyakarta, Rabu (10/5).

Lilik mengatakan, ada 10 kapanewon di Gunungkidul yang juga menyiapkan anggaran khusus untuk dropping air. Begitu pula dengan sejumlah kabupaten lain seperti Kulonprogo telah melakukan persiapan dengan menyiapkan dana rutin maupun anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) apabila dibutuhkan. Selain itu Dinas PUP-ESDM DIY telah membuat sejumlah sumur resapan untuk menampung air hujan. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki cadangan air bersih di musim kemarau.

"Dinas PUP-ESDM DIY juga melaporkan kalau dalam beberapa tahun ini telah membuat sumur bor. Kami berharap dengan sumur bor tersebut akan mengurangi jumlah daerah yang minta dropping air," terangnya. **(Ria)-d**

UJARAN KEBENCIAN PENELITI BRIN

Bareskrim Periksa TD, Pemilik Akun

JAKARTA (KR) - Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin sebagai saksi dalam perkara dugaan ujaran kebencian yang menjerat rekannya, Andi Pangarang Hasanuddin (APH) sebagai tersangka.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah di Jakarta, Rabu (10/5), mengatakan, pemeriksaan itu telah dilakukan Senin (8/5) lalu. "Kemudian, terhadap TD (Thomas Djamaluddin), pemilik akun FB yang ditanggapi tersangka APH, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 8 Mei 2023," kata Nurul Azizah.

Saat dikonfirmasi kepada Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso terkait pemeriksaan Thomas Djamaludin, ia membenarkan adanya kegiatan tersebut. "Betul, (Thomas Djamaluddin diperiksa) sebagai saksi," kata Rizki.

Namun, Rizki belum berkomentar lebih lanjut terkait berapa lama Thomas Djamaluddin diperiksa dan berapa pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dalam kasus tersebut, tersangka AP Hasanuddin ditetapkan tersangka karena unggah komentar pada akun media sosial Facebook yang menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dan/atau ancaman kekerasan dan/atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik.

Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan AP Hasanuddin sebagai tersangka, Minggu (30/4). Peneliti BRIN tersebut ditangkap di wilayah Jombang dan dibawa ke Bareskrim Polri. Hingga kini, polisi baru menetapkan seorang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mud Murod, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri, mengatakan, perkara itu merupakan reaksi dari status-status Thomas Djamaluddin yang ditanggapi tersangka AP Hasanuddin.

"Apa yang disampaikan Mas AP Hasanuddin, terlepas dari apapun yang kita baca dari tulisan dia, masuk dalam delik hukum karena sudah memberikan ancaman untuk melakukan pembunuhan," kata Ma'mun.

Menurutnya, komentar bernada ujaran kebencian dari AP Hasanuddin itu adalah respons terhadap status media sosial Thomas Djamaluddin. Ma'mun juga menggarisbawahi, dalam kasus tersebut Muhammadiyah tidak anti-kritik. **(Ant)-d**



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

EKSEKUSI RUMAH TERDAMPAK TOL: Petugas TNI dan Polri mengamankan proses eksekusi rumah warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Pele, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (10/5/2023). Pengerik Negeri Ki Pagan, mengawasi eksekusi 13 bidang tanah di desa tersebut untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta.